

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai isu global, energi menempati posisi yang paling krusial dalam percaturan ekonomi politik internasional. Lembaga Energi Amerika Serikat IEA (*International Energy Agency*) mengemukakan bahwa kebutuhan energi sampai pada tahun 2015 bagi negara non industri akan meningkat dua kali lipat.¹ Konsumsi energi dunia yang diproyeksikan meningkat antara periode 1990-an hingga 2020 sebesar hampir 60%, merupakan indikasi kuat akan semakin pentingnya kebutuhan energi bagi negara-negara di dunia.

Karena sifatnya yang sensitif dan rentan terhadap krisis, isu energi cenderung hanya dibicarakan dalam konteks krisis, sehingga diskusi mengenai isu energi seolah-olah hanya relevan ketika terjadi krisis energi. Krisis minyak yang kemudian berbuntut pada krisis energi diawal 1970-an yang melanda dunia (terutama barat) merupakan contoh yang mencolok tentang relevansi isu energi yang terbatas oleh situasi krisis. Bahkan hingga saat ini, situasi krisis masih bisa dirasakan dalam pola kekuatan penawaran dan permintaan pasar minyak dunia yang masih sangat sensitif pada isu lancar tidaknya pasokan dari kawasan asal sumber-sumber utamanya terutama Timur Tengah.

¹ *Ketika Energi Jadi Dewa* (diakses pada 14 Juli 2008) dari <http://jurnalekonomi.org/2007/12/17/ketika-energi-jadi-dewa/>

Di antara berbagai sumber energi tak terbarukan, minyak bumi merupakan sumber energi yang paling signifikan dan strategis. Minyak bumi adalah “*the king*” selama sepanjang abad kedua puluh, seiring dengan berkembangnya kapitalisme dan modernitas, khususnya di Amerika Serikat dan Eropa Barat. Minyak bumi adalah bisnis terbesar dunia, karena berkaitan dengan lebih dari 2/3 total konsumsi energi dunia. Sebagai sumber kekuatan utama dalam proses industrialisasi, minyak bumi telah menjadi semacam “urat nadi” bagi ekonomi nasional banyak negara, sehingga seringkali digunakan sebagai instrumen politik - keamanan dalam politik internasional.²

Sebagai salah satu negara industri, Amerika Serikat adalah sebuah contoh yang tepat untuk melihat dominasinya dari isu energi dan pertumbuhan ekonomi. Amerika Serikat mendefinisikan konsep keamanan nasionalnya secara lebih luas, mencakup isu-isu yang bersifat non militer. Dalam konteks ini, keamanan energi minyak bumi menjadi menjadi isu sentral dari para pengambil kebijakan Amerika Serikat.

Krisis minyak bumi yang mulai terjadi di awal dan akhir dekade 1970an, yang menaikkan harga minyak dunia hingga empat kali lipat, menjadi titik balik bagi Amerika Serikat dalam menghadapi kerentanan energi dalam negerinya. Oleh karena itu, penulis mencoba memberikan gambaran secara sistematis mengenai strategi apa yang dilakukan George W Bush dalam mengatasi krisis minyak bumi yang terjadi saat ini sehingga berdampak pula pada stabilitas domestik Amerika Serikat.

² Nurul Isnaeni, *Jepang dan Isu Keamanan Energi: Dari Krisis Minyak Dunia Hingga Politik Perubahan Iklim*. Depok, Jurnal Politik Internasional, Fisip UI, 2006, hal. 58.

Saat ini dunia tengah menghadapi krisis energi global dan akan memicu krisis ekonomi secara global. Fakta menunjukkan, bahwa harga minyak mentah pernah menembus angka yang belum pernah terjadi, yakni pada kisaran 147 US\$ per barel pada 11 Juli 2008.³ Kenaikan harga minyak dunia tidak hanya memicu kenaikan harga barang, melainkan juga akan mengubah dunia. Negara-negara di kawasan Timur Tengah menikmati pendapatan tambahan atas kenaikan yang luar biasa besarnya.

Sebagai kawasan penghasil minyak bumi, Timur Tengah merupakan kawasan yang mempunyai kandungan sumber daya alam dan mineral yang melimpah. Di kawasan ini tersimpan 742.7 miliar barel minyak bumi atau 61,9 persen dari total kandungan minyak dunia dan 72,13 triliun meter kubik gas alam atau 40,1 persen dari total kandungan gas alam di muka bumi.⁴

Peta ekonomi global akan menuju kepada titik keseimbangan yang baru, seandainya keuntungan penjualan minyak yang melimpah diinvestasikan secara inovatif kepada sektor-sektor produktif yang dalam jangka panjang meninggalkan ketergantungan kepada sumber daya alam minyak bumi yang berasal dari fosil, maka negara-negara penghasil minyak utama dunia akan muncul sebagai kekuatan ekonomi yang baru.

³ *Harga Minyak Mentah di Bawah 80 Dolar AS, Terendah Satu Tahun* (diakses 12 Oktober 2008) dari <http://www.antara.co.id/arc>

⁴ *Sanksi Dewan Keamanan PBB Terhadap Iran: Perangkap Perang Energi* (diakses pada 7 Agustus 2008); dari <http://korantempo.com/korantempo/2007/04/03/Opini/krn.20070403.70.id.html>

Pendapat itu paling tidak sebagaimana ditulis oleh Rana Foroohar⁵ pada Newsweek terbitan awal Juni 2008:

"Sudah lama diduga harga minyak mentah yang berbasis fosil akan terus meningkat. Tetapi kenaikan harga dari sekitar 20 US\$ per barrel pada tahun 1999 menjadi sekitar 95 US\$ per barrel pada tahun 2007, tidak hanya bisa dibaca dari satu sudut pandang. Dari sisi produksi, kecenderungan penurunan nampaknya terus terjadi, sementara peningkatan konsumsi nampaknya tidak terbendung."

Penurunan produksi minyak dunia terjadi antara lain karena kegagalan menemukan sumur-sumur minyak yang baru, kerusakan pada unit-unit produksi terutama di Nigeria, Irak, dan daerah-daerah konflik. Sementara tingkat konsumsi selain karena didorong oleh peningkatan aktifitas industri di China dan India, juga karena hampir semua negara-negara berkembang tengah memasuki fase industrialisasi seiring dengan terjadinya pergeseran dari negara pertanian menuju negara industri baru.

Kesenjangan antara produksi yang cenderung terus menurun dan tingkat konsumsi yang terus meningkat, kenaikan harga minyak dunia juga diperparah oleh ulah para spekulan di pasar bursa. Berfluktuasinya harga minyak dunia dan bahkan cenderung naik tanpa kontrol sama sekali sebenarnya tidak lepas dari keberadaan para spekulan di pasar bursa, karena pada dasarnya harga minyak dunia ditentukan oleh pasar bursa, dalam artian keseimbangan pasar (*Market Equilibrium*) antara penawaran dan permintaan. Penawaran dan permintaan minyak dunia dapat dilihat di bursa yang menangani transaksi

⁵ Rana Foroohar adalah seorang wartawan senior Newsweek's, editor in charge of all international business and economics coverage, overseas editions.

energi, seperti NYMEX⁶ (*New York Mercantile Exchange*) di New York, Amerika Serikat.

Minyak merupakan sumber energi yang tidak dapat diperbaharui, karenanya jumlah cadangan minyak dunia akan semakin berkurang seiring dengan bertambahnya penggunaan minyak tersebut. Tingkat pertumbuhan ekonomi dan penduduk yang tinggi di negara-negara dunia menyebabkan peningkatan konsumsi minyak mentah. Hal ini disebabkan karena kebutuhan energi untuk memutar roda perekonomian kian tinggi dan dalam proses produksinya negara industri lebih banyak menggunakan minyak bumi sebagai bahan bakar.

Peranan minyak dalam dunia internasional sangat penting sejak Perang Dunia I, yakni ketika bangsa-bangsa yang terlibat dalam perang tersebut menggantungkan energi pada minyak untuk menggerakkan mekanisme industri, militer, teknologi, komunikasi dan transportasi. Pada waktu itu Timur Tengah sudah menjadi posisi sentral dalam penyediaan energi dunia, akan tetapi pada awal 1970-an dunia menyadari betapa potensi minyak dapat digunakan sebagai senjata yang dapat mempengaruhi sistem Internasional yang ada. Namun sampai Perang Dunia ke II, karena negara-negara penghasil minyak mengalami kelangkaan pengetahuan teknis dan secara ekonomi sangat lemah, serta kebanyakan berada dibawah kontrol negara-negara kolonial, maka hampir semua kebijakan yang menyangkut explorasi,

⁶ *New York Mercantile Exchange, Inc* atau biasa disingkat NYMEX merupakan bursa berjangka komoditi terbesar didunia yang terletak di kota New York. NYMEX menangani transaksi produk energi dan logam maupun komoditi lainnya senilai milyaran USD yang diperjual belikan di lantai bursa dan juga dengan menggunakan sistim perdagangan elektronik.

produksi dan pemasaran dipegang oleh pemerintahan-pemerintahan kolonial itu sendiri yang berpusat diberbagai ibukota di dunia Barat.

Pada waktu itu, tujuh perusahaan minyak dari Barat yang sangat besar dan terkenal dengan sebutan "*The Seven Sisters*", menguasai hampir seluruh jaringan eksplorasi, produksi, distribusi, pemasaran serta penentuan harga (menguasai sekitar 70 % dari total produksi minyak dunia). Ketujuh korporasi minyak multinasional itu adalah: *Standard Oil of New Jersey* (Exxon), *Texas Company* (Texaco), *Standard Oil of California* (Socal), *Gulf, Vacuum Oil Company* (Mobill), *British Petroleum* (BP) dan *Royal Dutch* (Sheel).⁷

Setelah berakhirnya Perang Dunia ke II, bersamaan dengan bangkitnya nasionalisme dikalangan negara-negara yang sedang berkembang, negara penghasil minyak mulai berusaha merubah cara-cara eksploitasi minyak sampai pemasarannya yang dianggap merugikan negara-negara pemilik sumber minyak dan terlalu menguntungkan perusahaan-perusahaan minyak asing. Mula-mula negara penghasil minyak itu hanya menuntut dinaikkannya harga minyak dan menuntut royalti yang lebih besar agar supaya posisi "bargain" mereka lebih kuat. Tuntutan ini makin meningkat dan sejak tahun 1960, dengan dibentuknya OPEC sebagai kartel minyak internasional, mulailah suatu revolusi dalam proses politik perminyakan internasional yang lebih menguntungkan negara-negara produsen.

⁷ Aswab Mahasin, *Minyak dan Kekuasaan: Multinational, OPEC dan Nasionalisme Ekonomi*. Prisma, 1976, No.4, hal.21.

Pada saat berakhirnya perang Arab-Israel pada Oktober 1973, untuk pertama kalinya minyak dijadikan senjata politik negara-negara Arab secara sangat efektif.⁸ Embargo minyak pada tahun 1973 benar-benar menggoncangkan aliansi Atlantik, dimana negara-negara Eropa saling berebut mencari simpati negara-negara Arab dengan menyatakan dukungan pada tuntutan Arab dalam mencari perdamaian Timur Tengah, tanpa mengindahkan peringatan-peringatan Amerika Serikat sebagai pemimpin persekutuan Atlantik. Keretakan persekutuan Atlantik yang disebabkan embargo minyak dari kawasan Timur Tengah yang dipimpin oleh Saudi Arabia tersebut, membuat Amerika Serikat terperanjat bahwa ternyata minyak merupakan suatu senjata yang sangat efektif dan dapat menggoyahkan sendi-sendi perekonomian Barat.

Dengan memperhatikan fakta diatas dapat kita lihat bahwa sumber daya alam, khususnya minyak bumi merupakan faktor yang sangat penting bagi kelangsungan hidup dan kehormatan suatu bangsa. Krisis minyak dapat mempengaruhi stabilitas domestik suatu negara, karena naiknya harga minyak dunia berpengaruh pada besarnya biaya transportasi, harga barang dan jasa maupun ketersediaan beberapa produk seperti bahan makanan, air dan kebutuhan lainnya. Jika harga minyak terlalu tinggi maka harga barang dan jasa akan mengalami kenaikan sehingga dapat terjadi inflasi.

Minyak bumi dan gas alam adalah sumber energi yang paling strategis.

Minyak berada di jantung ekonomi modern. Hampir seluruh infrastruktur

⁸ Qystein Noreng, *Minyak Dalam Politik: Upaya Mencapai Konsensus Internasional*. CV.Rajawali, 1993. Hal. 29.

ekonomi industri bergantung pada minyak. Di Amerika, kendatipun hanya menyumbang sekitar 5 persen dari GDP, minyak merupakan sumber energi utama yang menopang pertumbuhan ekonomi. Sebanyak 40 persen total kebutuhan energi Amerika Serikat berasal dari minyak, 24 persen dari gas, 23 persen dari batu bara, 8 persen dari energi nuklir, dan 5 persen dari sumber lainnya.⁹

Situasi yang terjadi di negara Amerika adalah negara yang memiliki kehidupan industri cukup tinggi, sehingga masyarakat Amerika Serikat bergerak dalam dunia industri. Tingginya kegiatan industri membuat penyerapan tenaga kerja semakin besar untuk menopang kegiatan industri. Hal ini jelas akan berpengaruh pada meningkatnya tingkat penghasilan penduduk sehingga masyarakat pun semakin memiliki tingkat konsumsi yang tinggi, termasuk konsumsi bahan bakar akibat berkembangnya teknologi. Dan konsumsi ini pun tidak hanya terbatas pada industri saja tetapi juga menjalar pada bidang transportasi dan rumah tangga.

Amerika Serikat merupakan negara kaya yang sangat boros dalam mengkonsumsi minyak. Pada tahun 2000, rata-rata konsumsi minyak di Amerika sekitar 4.000 liter per kapita, padahal rata-rata konsumsi dunia hanya sekitar 600 liter per kapita. Hal ini menunjukkan bahwa konsumsi minyak

⁹ Sanksi Dewan Keamanan PBB Terhadap Iran: Perangkap Perang Energi (diakses pada 7 Agustus 2008); dari <http://korantempo.com/korantempo/2007/04/03/Opini/m.20070403.70.id.html>

masyarakat Amerika lebih dari enam kali lipat dari rata-rata konsumsi minyak dunia¹⁰.

Fakta di atas menunjukkan bahwa cadangan minyak Amerika sebesar 30,4 milyar barrel yang merupakan 3 persen dari total cadangan minyak dunia, tidak seimbang dengan tingkat konsumsinya yang mencapai lebih dari 20 juta barel per hari. Sehingga tidaklah terlalu mengherankan, untuk memenuhi kebutuhan minyaknya, lebih dari 60 % terpaksa mengimpor dari negara lain.¹¹ Dengan demikian menyiratkan sebuah kondisi ketergantungan yang cukup signifikan.

Kebutuhan energi Amerika Serikat yang sangat tinggi pada akhirnya harus berhadapan dengan dinamika persoalan yang cukup rumit. Saat ini Amerika Serikat berusaha keras melakukan konservasi energi demi mempertahankan tingkat pertumbuhan ekonomi nasionalnya.

Seiring dengan berjalannya waktu, Amerika Serikat mulai berfikir menghadapi berbagai kondisi permasalahan untuk kepentingan negaranya. Antara lain dalam masalah kelangkaan energi yang dihadapinya di masa yang akan datang, dimana untuk menggerakkan roda perindustrian serta untuk menciptakan lapangan kerja di masa depan diperlukan suatu jaminan cadangan minyak yang cukup besar. Maka dari itu, untuk mengatasi permasalahan tersebut salah satu cara yaitu dengan invasi.

¹⁰ *Krisis Irak: Apakah Perang Untuk Minyak* (diakses pada 11 Agustus 2008) dari http://www.kompas.com/kompas_cetak/0303/10/ekonomi/174985.htm

¹¹ *Ibid.*

Pada saat Amerika Serikat mengalami tragedi *World Trade Center* (WTC) pada tanggal 11 September 2001 dengan serta merta Amerika Serikat melayangkan tuduhan kepada negara-negara yang menjadi musuh negaranya, yakni Irak, Iran dan Korea Utara.¹² Amerika Serikat menuduh pelaku dibalik tragedi WTC adalah jaringan Al-Qaeda, walaupun bukti tersebut masih belum jelas sampai saat ini. Amerika Serikat menyatakan perang terhadap kelompok Al-Qaeda dan pendukungnya. Kemudian Amerika Serikat menuduh Irak mempunyai hubungan erat dengan jaringan Al-Qaeda, di samping itu pula Amerika Serikat menuduh Irak merupakan negara yang memiliki senjata pemusnah massal yang dapat mengancam negara-negara lain di dunia.

Amerika Serikat bahkan mampu meluaskan pengaruhnya terhadap PBB, segala keputusan atau kebijakan yang dikeluarkan PBB tidak terlepas dari kepentingan negaranya. Kebijakan PBB yang tidak sesuai dengan kebijakan Amerika Serikat akan dengan mudah Amerika Serikat menggunakan hak vetonya. Amerika Serikat mendesak Dewan Keamanan PBB agar segera mengeluarkan resolusi yang memberikan wewenang untuk menyerang Irak.

Amerika Serikat melancarkan kampanye dan propaganda dalam rangka mendapatkan dukungan internasional dan anggota NATO untuk menyerang Irak dengan isu dimilikinya senjata pemusnah massal dan adanya keterkaitan Irak dengan jaringan teroris Al-Qaeda di Afganistan, serta dukungan Irak pada kegiatan pelatihan teroris di Irak Utara. Atas tekanan dan desakan Amerika Serikat, maka Dewan Keamanan PBB mengeluarkan Resolusi Nomor 1441

¹² *Obrak-Abrik Irak*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, September 2003 hal.2

tanggal 8 November 2002 tentang pelucutan senjata pemusnah massal yang diduga dimiliki Irak. Resolusi PBB tersebut kurang mendapat respon dan tanggapan dari Irak, sehingga Amerika Serikat menganggap perlu menindak pimpinan Irak dengan melakukan invasi ke Irak guna menggulingkan pemerintahan Saddam Hussein.

Pada bulan Maret tahun 2002, Presiden George W Bush mengirim Wakil Presiden Amerika Serikat Dick Cheney ke sembilan negara Arab, plus Israel dan Turki, untuk konsultasi dan klarifikasi pendapat para pemimpin negara tersebut tentang program aksi serangan Amerika Serikat ke Irak. Seusai pidato kenegaraan Presiden George W Bush dan lawatan Wapres Dick Cheney ke Timur Tengah itu, tekad Amerika Serikat semakin transparan untuk menjatuhkan kekuasaan Saddam Hussein di Baghdad.

Pada tanggal 18 Maret 2003 Presiden George W Bush mengeluarkan ultimatum, bahwa Presiden Saddam Hussein dan keluarganya harus meninggalkan Irak dalam tempo 2 X 24 jam atau menghadapi serangan Amerika Serikat dan Sekutunya. Pada tanggal 20 Maret 2003 Rudal jelajah Tomahawk yang diluncurkan dari kapal perang AS di sekitar Teluk mulai menghantam sasaran-sasaran strategis di Irak yang diikuti jet pembom siluman F-117 Nighthawk yang lepas landas dari Qatar dan Oman. Inilah yang menandai dimulainya serangan udara Amerika Serikat ke Irak dengan sandi *Operation Iraqi Freedom*.¹³

¹³ Colonel Walter J. Boyne, *Operation Iraqi Freedom*, edisi pertama, November 2003, hal.14

Sehingga apabila kita melihat rekam jejak sejarah Amerika Serikat, bahwa kepentingan Amerika Serikat di negara-negara kawasan Timur Tengah khususnya pada saat melakukan invasi ke Irak pada tahun 2003, tidak lepas dari motivasinya untuk melakukan pencarian sumber-sumber energi mineral strategis yang terdapat dikawasan tersebut, khususnya minyak bumi yang merupakan bahan baku utama untuk pembangkit energi bagi proses industrialisasi.

B. Rumusan Permasalahan

Dari latar belakang permasalahan diatas, maka disusun perumusan masalah sebagai berikut:

“Bagaimanakah strategi pemerintahan George W Bush dalam mengatasi krisis minyak bumi dunia yang berdampak pada stabilitas domestik Amerika Serikat?”

C. Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana strategi pemerintah Amerika Serikat dalam memenuhi kebutuhan energi minyak bumi.
2. Untuk memahami pentingnya faktor sumber daya alam bagi kelangsungan hidup dan kehormatan suatu bangsa dalam hal ini negara Amerika Serikat sebagai salah satu negara pengguna minyak bumi terbesar.

3. Untuk memperkaya khazanah keilmuan dibidang politik energi, yang berimplikasi pada bidang lain.

D. Kerangka Dasar Pemikiran

Dalam studi Hubungan Internasional, kita dapati bahwa kajian kebijakan luar negeri sangat luas dan kompleks. Kebijakan luar negeri dalam pengertian luas terdiri atas pola-pola yang diwujudkan oleh suatu negara dalam memperjuangkan dan mewujudkan kepentingan nasional, dalam hubungannya dengan negara lain atau dilakukan terhadap lingkungan eksternalnya. Politik luar negeri dapat berarti sebagai tindakan rasional (*Rational Action*) suatu negara dalam usaha memenuhi kepentingan nasionalnya dilingkungan internasional, dapat juga berarti hanya sebagai pernyataan gramatik yang diucapkan oleh para pemimpin atau penguasa suatu negara terhadap masyarakat internasional, dapat pula sebagai agregasi seluruh kepentingan dalam negeri suatu negara atau bangsa.¹⁴

Teorisasi dalam hubungan internasional yang mempelajari politik luar negeri, yaitu Graham T. Allison yang mengajukan tiga model untuk mendeskripsikan proses pembuatan keputusan politik luar negeri. Ada tiga model yang diajukan Allison yaitu: Model Aktor Rasional, Model Proses Organisasi dan Model Politik Birokratik.

Untuk dapat menjelaskan dan menerangkan pokok permasalahan diatas, maka penulis menggunakan Model Aktor Rasional untuk dapat

¹⁴ Tulus Warsito *Teori-teori Politik Luar Negeri*, Yogyakarta, Bigraf, 1998, hal.73

mempermudah mendeskripsikan mengenai proses pembuatan keputusan luar negeri serta mengenai fenomena perubahan politik luar negeri sebuah negara.

Dalam Model ini politik luar negeri dipandang sabagai akibat dari tindakan-tindakan aktor rasional, terutama suatu pemertintah yang monolit¹⁵, yang dilakukan dengan sengaja untuk mencapai suatu tujuan. Pembuatan keputusan politik luar negeri digambarkan sebagai suatu *proses intelektual*. Perilaku pemerintah dianalogikan dengan perilaku individu yang bernalar dan terkoordinasi. Dalam analogi ini, individu itu -- melalui serangkaian tahap-tahap intelektual, dengan menerapkan penalaran yang sungguh-sungguh -- berusaha menerapkan pilihan atas alternatif-alternatif yang ada. Jadi, unit analisis pembuatan keputusan ini adalah pilihan-pilihan yang diambil oleh pemerintah. Dengan demikian, analisis politik luar negeri harus memusatkan perhatian pada penelaahan kepentingan nasional dan tujuan dari suatu bangsa, alternatif-alternatif haluan kebijaksanaan yang bisa diambil oleh pemerintahnya dan perhitungan untung rugi atas masing-masing alternatif itu.¹⁶

Dalam model aktor rasional digambarkan bahwa para pembuat keputusan dalam melakukan pilihan-pilihan atau alternatif-alternatif itu menggunakan kriteria "optimalisasi hasil". Para pembuat keputusan itu digambarkan selalu siap untuk melakukan perubahan atau penyesuaian dalam kebijaksanaannya. Mereka juga diasumsikan dapat memperoleh informasi yang cukup banyak sehingga dapat melakukan penelusuran tuntas terhadap semua

¹⁵ Monolit adalah kesatuan terorganisasi yang membentuk kekuatan tunggal dan berpengaruh

¹⁶ Mochtar Mas'oed, *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*, Jakarta: LP3ES, 1990, hal. 234

alternatif kebijaksanaan yang mungkin dilakukan dan semua sumber-sumber yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan yang mereka tetapkan.

Graham T. Allison memberikan gambaran mengenai proses pembuatan keputusan. Model yang digunakan adalah model aktor rasional, model proses organisasi dan model politik birokratik. Dalam model ini politik luar negeri dipandang sebagai akibat dari tindakan aktor rasional untuk mencapai suatu tujuan. Aktor rasional dipandang sebagai orang yang mengetahui tentang pilihan-pilihan yang tersedia dan konsekuensi-konsekuensi yang mungkin timbul dari setiap pilihan sebelum membuat keputusan.

Pembuatan keputusan luar negeri digambarkan sebagai suatu proses intelektual. Dimana pemerintah dianalogikan sebagai perilaku individu yang bernalar dan terkoordinasi. Setiap individu melalui beberapa tahap intelektual menerapkan dan menetapkan pilihan atas alternatif-alternatif yang ada. Maka unit analisis pada pembuatan keputusan ini adalah pilihan-pilihan yang diambil oleh pemerintah. Dengan demikian, analisis tentang politik luar negeri harus memusatkan perhatian pada kepentingan nasional dan tujuan dari suatu bangsa itu sendiri.

Model ini sangat terkenal terutama karena asumsi rasionalitas yang dikandungnya. Dalam model ini para pembuat keputusan itu dianggap rasional, dan kita pada umumnya memang cenderung berpikir bahwa keputusan (terutama yang menyangkut politik luar negeri) di buat secara rasional. Karena itulah, menurut Allison, model ini paling sering diterapkan untuk mendeskripsikan dan menjelaskan politik luar negeri. Batasan rasional

mempunyai arti yang spesifik, dalam proses pembuatan keputusan didasarkan pada empat langkah¹⁷:

1. Pemilihan yang obyektif yang bernilai dari suatu kebijakan yang sudah pasti ditujukan pada tujuan yang maksimal,
2. Pemilihan atas alternatif-alternatif yang ada untuk mencapai hasil yang diharapkan,
3. Perhitungan dari untung dan rugi dari alternatif yang di ambil,
4. Pemilihan atas alternatif yang memberikan hasil yang optimal.

Apabila kita mengimplementasikan model aktor rasional diatas dengan strategi yang dapat diambil oleh Amerika Serikat dalam mengatasi krisis minyak bumi adalah engan melihat perkiraan kemampuan Amerika Serikat itu sendiri. Amerika Serikat dalam berbagai segi dapat ditempatkan pada posisi yang lebih kuat maupun yang lebih lemah. Amerika Serikat memiliki posisi yang lebih lemah apabila dihadapkan pada posisi ketergantungan minyak. Karena cadangan minyak yang dimiliki Amerika Serikat tidak seimbang dengan tingkat konsumsinya yang besar. Sebaliknya Amerika Serikat memiliki posisi yang lebih kuat bila dihadapkan pada kekuatan militer. Oleh karena itu dengan posisinya yang kuat di bidang militer, Amerika Serikat memiliki pilihan alternatif-alternatif yang ada untuk mencapai hasil yang diharapkan, dengan memperhatikan untung ruginya, termasuk melakukan invasi militer ke Irak.

¹⁷ Spainer Uslaner, *American Foreign Policy Making & the Democratic Dilemmas*, CBS College Publishing, New York, 1982, hal. 226

Sejak tragedi *World Trade Center* pada 11 September 2001, keyakinan para pemimpin Amerika Serikat bahwa kepentingan negara tidak dapat dilepaskan dari situasi keamanan global, yang pada akhirnya akan menuntut kepada penguatan posisi hegemoni Amerika Serikat. Hegemoni menyodorkan satu pilihan yaitu tunduk kepada Amerika Serikat dan keterlibatan luas dalam percaturan politik internasional. Penguatan hegemoni Amerika Serikat harus mampu mengendalikan aset-aset kunci global yakni minyak, sehingga tampak jelas ketika Amerika Serikat melakukan invasi ke Irak motif dari semua itu adalah minyak.

Selama ini, untuk memenuhi kebutuhan minyaknya, Amerika Serikat lebih banyak bergantung kepada Arab Saudi, bukan kepada Irak. Dengan menguasai Irak, Amerika Serikat bukan hanya menguasai salah satu sumber minyak terbesar di dunia tetapi juga menguasai kepentingan Rusia, Perancis, Cina maupun Jepang yang selama ini membeli minyak kepada Irak. Tentu saja ini adalah salah satu cara untuk bersaing dengan Arab Saudi sebagai penghasil minyak terbesar di dunia. Karena dengan menguasai minyak di negara Irak, Amerika Serikat juga akan mampu mengurangi ketergantungan pasokan minyaknya dari Arab Saudi.

Kendali atas minyak bukanlah semata-mata mendapatkan bagian dari suplai minyak atau keuntungan dari kontrak eksplorasi. Lebih dari pada hal tersebut, kendali atas minyak adalah memegang kendali atas ketersediaan energi dunia dan menjaga akses sumber minyak dari pesaing-pesaing

globalnya. Sehingga invasi militer ke Irak merupakan rencana untuk menguasai minyak berdasarkan kepentingan Amerika Serikat.

E. Hipotesa

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas dan dijelaskan dengan menggunakan kerangka konseptual, maka penulis menarik hipotesa mengenai strategi pemerintah Amerika Serikat dalam mengatasi krisis minyak bumi, yakni:

Melakukan diplomasi minyak yang berkedok *Weapon of Mass Destructions*,
Demokrasi, HAM dan Terorisme di Irak

F. Metodologi Penelitian

Hasil dari penelitian ini dilakukan dengan metode Deskriptif Analisis, artinya dengan penggambaran umum atas peristiwa/kejadian, kemudian dianalisa serta didapatkan suatu kesimpulan. Pengumpulan data dalam penelitian ini dapat diperoleh dengan menggali studi pustaka. Oleh karena itu, data yang akan diolah adalah data sekunder yang bersumber dari literatur-literatur, makalah ilmiah, jurnal ilmiah, majalah, surat kabar, internet, dan sumber-sumber lain yang relevan. Data yang diperoleh nantinya akan dianalisa dengan menggunakan kerangka konseptual yang telah ditetapkan. Meskipun

menganalisa dengan data sekunder, penulis merasa yakin bahwa penelitian ini tidak akan mengurangi kebenaran ilmiahnya.

G. Jangkauan Penelitian

Untuk mempermudah dan menghindari kesulitan dalam mencari data, serta menganalisa pembahasan yang keluar dari tema, maka penulis memberikan batasan penelitian yakni antara tahun 2001 sampai 2008 tanpa menutup kemungkinan waktu diluar jangkauan penelitian yang masih berkaitan dengan penelitian. Penelitian ini dimulai awal 2001 ketika Presiden George W Bush menjabat sebagai presiden dan menyikapi krisis minyak bumi yang sedang melanda dunia yang berdampak pada stabilitas regional Amerika Serikat.

H. Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri dari lima bab, dimana pembahasan dalam masing-masing bab akan dijelaskan dan dijabarkan lebih rinci kedalam sub-sub bab pembahasan yang saling berhubungan, sehingga pada akhirnya akan membentuk karya tulis yang runtut dan sistematis. Adapun sistematika dari penulisan ini sebagai berikut:

BAB I Merupakan konseptualisasi dan rencana penelitian yang akan dilakukan penulis guna menemukan jawaban atas masalah yang hendak penulis analisis, antara lain berisi: alasan pemilihan judul,

tujuan penulisan, latar belakang masalah, rumusan permasalahan, kerangka konseptual, hipotesa, metode penulisan, jangkauan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Akan menjelaskan tentang minyak bumi dan keamanan energi Amerika Serikat. Untuk mendukung sub pembahasan ini, penulis akan menjelaskan negara-negara pengguna minyak bumi terbesar, krisis minyak bumi dan konsep keamanan energi Amerika Serikat.

BAB III Penulis akan memaparkan tentang potensi minyak bumi kawasan Timur Tengah bagi Amerika Serikat. Pada sub pembahasan penulis akan menjelaskan arti penting kawasan Timur Tengah dan negara-negara Timur Tengah yang prospektif untuk mensuplai minyak bagi Amerika Serikat.

BAB IV Akan diuraikan pembahasan mengenai strategi pemerintah Amerika Serikat dalam mengatasi krisis minyak bumi dunia.

BAB V Berisi mengenai kesimpulan dari apa yang telah dibahas dari bab-bab sebelumnya.